

GUGURNYA HAK ASUH ANAK PADA IBU KANDUNG PASCA PERCERAIAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Oleh :

Poeby Erlanda

201510115122



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

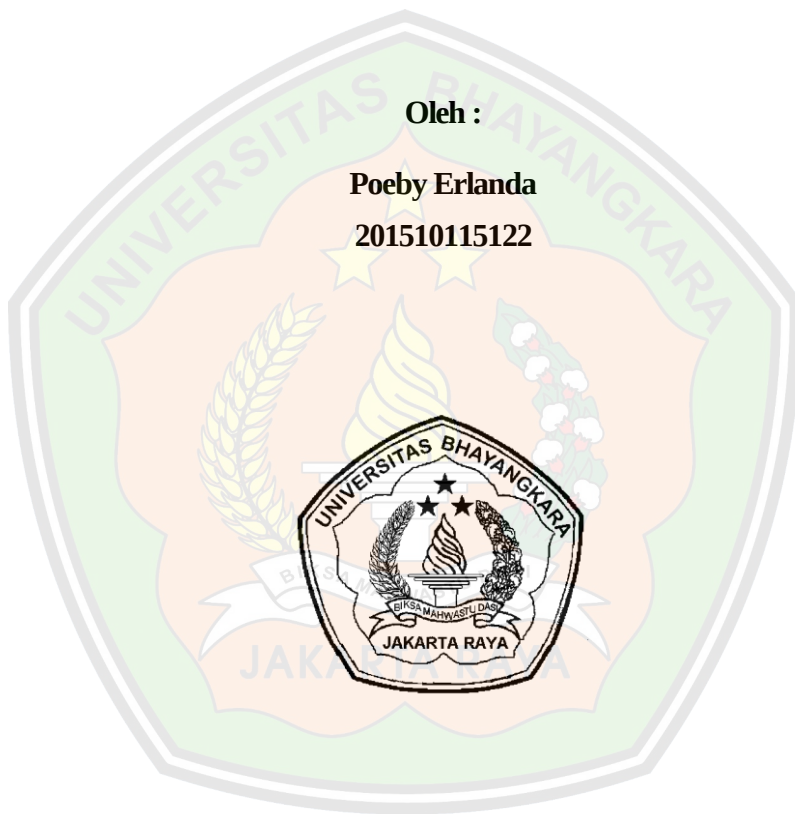
GUGURNYA HAK ASUH ANAK PADA IBU KANDUNG PASCA PERCERAIAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Oleh :

Poeby Erlanda

201510115122



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Gugurnya Hak Asuh Anak Pada Ibu Kandung Pasca
Perceraian Dari Perspektif Hukum Perdata
Nama Mahasiswa : Poeby Erlanda
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115122
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Gugurnya Hak Asuh Anak Pada Ibu Kandung Pasca
Perceraian Dari Perspektif Hukum Perdata
Nama Mahasiswa : Poeby Erlanda
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115122
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, 29 Maret 2022

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Anggreany Haryani Putri SH., MH.
NIDN. 0319018502
Penguji I : Elfirda Ade Putri SH., MH.
NIDN. 0306018804
Penguji II : Indra Lorenly Nuinggolan SH., MH.
NIDN. 0326078902

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing SH., MH
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Poeby Erlanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115122

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Agustus 1996

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Gugurnya Hak Asuh Anak Pada Ibu Kandung Pasca Perceraian Dari Perspektif Hukum Perdata*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan



Poeby Erlanda

201510115122

PERNYATAAN PESETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Poeby Erlanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115122

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Agustus 1996

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Gugurnya Hak Asuh Anak Pada Ibu Kandung Pasca Perceraian Dari Perspektif Hukum Perdata"**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan



Poeby Erlanda

ABSTRAK

Poeby Erlanda, 201510115122, *Gugurnya hak asuh anak pada ibu kandung pasca perceraian dari perspektif hukum perdata.*

Perkawinan merupakan suatu hal yang esensial bagi kehidupan tiap-tiap manusia,, karena disamping perkawinan sebagai sarana membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia atau menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Pada dasarnya, perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Namun, dalam praktiknya tidak semua perkawinan berjalan seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan, banyak juga perkawinan yang berakhir pada perceraian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya perselingkuhan, kurangnya komunikasi antara pasangan suami-istri, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bagi pasangan yang sebelumnya telah dikaruniai buah hati, ketika terjadi perceraian maka yang harus didahulukan adalah kepentingan anak, khususnya anak yang masih dibawah umur. Hak asuh anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan secara otomatis jatuh ketangan pihak ibu, namun dalam praktiknya hal tidak memungkiri kemungkinan hak asuh tersebut jatuh kepada pihak ayah. Pemberian hak asuh anak dibawah umur tersebut kepada pihak ayah tidak lain untuk melindungi kepentingan si anak.

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menggugurkan hak asuh ibu terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak asuh anak dibawah umur secara otomatis jatuh kepada pihak ibu, namun demi melindungi kepentingan anak dibawah umur tersebut, hak asuh dapat diberikan kepada pihak ayah apabila pihak ibu melakukan tindak pidana, berselingkuh, menjadi pemabuk, gemar berjudi, dan lain sebagainya. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwa hak asuh anak dibawah umur dapat jatuh ketangan ayah apabila pihak ibu melakukan perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: **Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak.**

ABSTRACT

Poeby Erlanda, 201510115122, Loss of child custody to the biological mother after a divorce based on civil law perspective.

Marriage is a essential thing for every human life, because in addition to marriage as a means of forming a family, marriage doesn't only contain elements of human relation with another human or concerning civil relations, marriage also contains elements of sacredness, the relationship between humans and their god. Basically, marriage has a goal to form a happy, eternal and prosperous family. However, in the practice not all marriage run as expected in the purpose of marriage, many marriage also end in a divorce. This is caused by several factor, namely the existence of infidelity, lack of communication between husband and wife, domestic violence (KDRT). For couples who has been blessed with children previously, when a divorce occurs, the interests of the children who are underage, must be come first,. Custody of underage children according to Law Number 1 of 1974 will automatically fall to the hands of mother, but in the practice it doesn't denied the possibility that the custody will fall to the father side. The granting of custody of minors the father is nothing to protect the interests of the child.

The research method that the researcher uses in this research is normative juridical, namely by examining library materials or secondary data as the basic material for research by tracing the regulations and literature related to the problem under study. This study aims to see what are things that can denied the mother's custody of the children.

Based on the research results, based on Law Number 1 of 1974 custody of the underage children will automatically fall to mother's side, but in the order to protect the interest of these underage childrens, the custody can be given to the father's side if the mother commits a crime, has an affair, becomes a drunkard, likes to gamble, and others. Based on the analysis that has been done, the reasercher concludes that the provision of custody of underage children can fall into the hands of the father if the mother commits the acts mentioned in Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 208 of the Civil Code.

Keywords: Marriage, Divorce, Children Custody.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi yang berjudul "Gugurnya Hak Asuh Anak Pada Ibu Kandung Pasca Perceraian Dari Perspektif Hukum Perdata" dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan secara moril maupun materil. Dan oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan serta doa terhadap penulis.

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. H. Bambang Karsono SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimma SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Yulianto Syahyu SH., MH., selaku Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi serta kritik dan juga arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Ibu Elfrida Ade Putri SH., MH., Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang dengan perantarnya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
6. Kedua orang tua yang tak pernah putus memberikan support kepada

penulis.

7. Seluruh teman yang juga selalu menyemangati dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bekasi, 29 Maret 2022



Poeby Erlanda

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
MOTTO	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	11
1.5.1 Kerangka Teoritis	11
1.5.2 Kerangka Konseptual	12
1.5.3 Kerangka Pemikiran (<i>Framework</i>).....	14
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Umum Negara Hukum dan Perkawinan	17
2.1.1 Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	17
2.1.2 Perkawinan Menurut KUHPerdara	18

2.1.4 Perkawinan Menurut Ahli	20
2.1.5 Syarat-Syarat Perkawinan	21
2.2 Tinjauan Umum Perceraian.....	22
2.3 Tinjauan Umum Perlindungan Anak	25
2.3.1 Definisi anak	25
2.3.2 Hak Asuh Anak	25
2.3.3 Perlindungan Hukum	27
2.3.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	27
BAB III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Pendekatan Penelitian	30
3.3 Sumber Bahan Hukum	32
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hal-Hal Yang Dapat Menggugurkan Hak Ibu Terhadap Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian dari Perspektif Hukum Perdata	35
4.2 Implementasi Putusan Hakim Tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Pihak Ayah.....	40
BAB V. PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Angka Perceraian di Indonesia 2015-2019.

Tabel 1.2. Tingkat Perceraian Penduduk Kota Bekasi (Pengadilan Negeri).

Tabel 1.3. Tingkat Perceraian Penduduk Kota Bekasi (Pengadilan Agama).



DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
HIR	: Herzien Inlandsch Reglement
RBg	: Rechtreglement voor de Buitengewesten



MOTTO

“Jika Orang Lain Bisa, Saya Juga Bisa !!”

